

## **BAB III**

### **KONFLIK DI SUDAN SELATAN**

Bulan-bulan pertama dari konflik di Sudan Selatan dipenuhi dengan kekerasan terhadap warga sipil atas perbedaan etnis. Banyak warga sipil yang terjebak diantara peperangan dan tidak mendapatkan perlindungan. Pasukan pemerintah yang memiliki kewajiban untuk melindungi warga negaranya lalai dalam menjalankan tugasnya karena terlalu fokus terhadap konflik dengan pasukan oposisi dalam perebutan wilayah.

Pasukan pemerintah dan oposisi sama-sama bertanggungjawab atas tindakan yang luar biasa atas kejahatan perang dan dalam beberapa kasus juga kejahatan potensial terhadap kemanusiaan. Terjadi banyak penjarahan dan penghancurkan properti sipil termasuk rumah, infrastruktur kemanusiaan seperti mobil dan kantor lembaga bantuan, fasilitas medis, termasuk rumah sakit utama. Kedua belah pihak juga melakukan tindak kekerasan yang ditargetkan pengungsian, termasuk gereja-gereja, rumah sakit, dan basis PBB.

#### **A. Sejarah Sudan Selatan**

Pembentukan Sudan Selatan dan kemerdekaan dari Sudan diikuti upaya internasional yang signifikan dan berkelanjutan. Penerapan Perjanjian Damai Komprehensif (Comprehensive Peace Agreement/CPA) pada tahun 2005 dimaksudkan untuk membawa mengakhiri sejarah kekerasan dan konflik antara keduanya. Perjanjian itu sendiri pada kenyataannya, masih meninggalkan beberapa isu yang belum terpecahkan, termasuk status Abyei, Kordofan Selatan dan Blue Nile; demarkasi akhir dari batas-batas dua negara (Sudan dan Sudan

Selatan); dan pengaturan untuk berbagi pendapatan minyak. Pada kenyataannya, CPA adalah pakta elit oleh salah satu dari sejumlah pemimpin Sudan Selatan dan pemerintah di Khartoum. Hampir satu dekade setelah penandatanganan perjanjian, tak satu pun dari masalah ini telah diselesaikan selain masalah pembagian hasil minyak. Kejadian tersebut menunjukkan fakta bahwa CPA semata-mata diciptakan sebagai alat untuk mencegah perang terjadi, bukan untuk membangun kondisi yang stabil dan tidak ada petunjuk praktis untuk perdamaian yang berkelanjutan. Hal ini diperkuat oleh kesulitan dalam mencapai kesepakatan, proses yang membutuhkan banyak dukungan direktif dari komunitas internasional yang memiliki sedikit nafsu makan karena membiarkan konflik di Sudan bergemuruh tanpa resolusi.

Sudan Selatan (memiliki wilayah yang dikenal selama masa transisi yang disediakan di dalam CPA) yang menandatangani periode sebelum Januari 2011 untuk referendum kemerdekaan (dari Sudan), diberikan kesempatan untuk menunjukkan model baru keterlibatan pasca-konflik. Keterlibatan tersebut berupa bantuan dari negara-negara pendonor untuk membangun bagian-bagian penting dari negara dengan menghabiskan miliaran dolar. Dengan demikian, Gerakan Pembebasan Rakyat Sudan (Sudan People's Liberation Movement/Army//SPLM/A) di Juba harus bekerjasama dengan keinginan pendonor. Terlepas dari mencoba untuk membujuk pemilih dalam referendum untuk memilih persatuan dengan jalan kemerdekaan. Di sisi lain, Khartoum membuat sedikit upaya untuk menunjukkan bahwa mereka ingin untuk tetap tinggal. Donor mencoba untuk bersikap netral dalam proses referendum dan menemukan bahwa Juba lebih mudah untuk diajak bekerjasama daripada

Khartoum dan tampak puas, setidaknya secara informal, untuk bekerja dengan Sudan Selatan pada asumsi bahwa kemerdekaan tak terelakkan pada referendum.

Setelah referendum disimpulkan, dengan lebih dari 98 persen dari suara memilih untuk mendukung pemisahan diri, Sudan Selatan mulai membangun menuju kemerdekaan pada bulan Juli 2011 dan memulai pembentukan Republik baru Sudan Selatan. Tanda-tanda mengkhawatirkan atas otokrasi sudah mulai muncul pada tahap ini, meskipun dilihat sebagai hal wajar untuk memenuhi pelaksanaan CPA yang ketat. Diskusi tentang konstitusi baru secara efektif dikemukakan oleh presiden ketika isu federalisme (banyak disukai di negara-negara equatorial) dan kekhawatiran atas kekuasaan presiden yang mengancam akan memermalukan republik baru dalam persiapan untuk kemerdekaan. Segala bentuk perlawanan oleh Pemerintah Republik Sudan Selatan terhadap banyak bentuk kritik pada dasarnya adalah bagian dari langkah awal Pemerintah Sudan Selatan dalam belajar mengelola negaranya. (Brown, 2014, hal. 3-4)

#### B. Faktor pendukung terjadinya konflik

Setelah kemerdekaan, tanda-tanda pertama dari disfungsi dalam pemerintahan Sudan Selatan tidak butuh waktu lama untuk menunjukkan diri. Presiden Salva Kiir tidak mengumumkan susunan pemerintahan pertama pasca-kemerdekaan selama lebih dari enam minggu. Awalnya, ini dimaksudkan agar menjadi lebih inklusif dan seimbang mungkin, meskipun presiden tampaknya akan mengalami kesulitan untuk mengakomodasi segala bentuk kepentingan dan kelompok politik yang mengelilinginya di SPLM. (SudanTribune, 2011) Presiden Salva Kiir harus menyediakan pemerintahan yang relatif koheren untuk 18 bulan

pertama merupakan ujian pertama keterampilan politik Presiden Kiir, bahkan ia harus siap untuk menyingkal keinginan pribadinya dalam memilih menteri.

Dengan kemerdekaan datang harapan besar dari masyarakat internasional. Negara-negara donor, yang sebelum kemerdekaan telah mengakui kurangnya Sudan Selatan dalam hampir semua bentuk kapasitas pemerintahan, mulai mengkritik pemerintah karena tidak dapat mempromosikan dan melindungi hak asasi manusia - hal yang memperoleh sedikit perhatian di Juba. Pemerintah Sudan Selatan mulai frustrasi dengan ekspektasi dari masyarakat internasional yang menginginkan perubahan besar dalam tanggung jawab hukum untuk promosi hak asasi manusia, serta kapasitas dan budaya yang diperlukan untuk melakukannya. Masalahnya bukan karena pemerintahan baru enggan untuk mewujudkan hal tersebut, melainkan karena pemerintah menilai masih banyak masalah lain yang lebih penting harus di selesaikan terlebih dahulu, dan bahwa prioritas hak asasi manusia akan meningkat seiring waktu.

Disisi lain, Juba gagal menunjukkan pengaruhnya di Khartoum, Sudan Selatan mematikan produksi minyak 350.000 barel per hari pada Januari 2012 berturut-turut lebih yang menyebabkan Sudan Selatan tidak dapat memenuhi syarat untuk mengekspor minyak mentah melalui pipa dan fasilitas di Sudan. Hal tersebut seharusnya merupakan perhatian bersama yang tertulis dalam CPA. Dalam kasus minyak – Juba percaya bahwa tindakan tersebut merupakan salah satu upaya untuk menghambat kemajuan Sudan Selatan, mencerminkan kurangnya rute alternatif ke laut - Sudan Selatan memutuskan bahwa minyak tersebut lebih baik ditinggalkan di tanah daripada tersedot. (Brown, 2014, hal. 4-5)

Kerugian pendapatan untuk kedua Sudan Selatan dan Sudan adalah bencana. Kementerian keuangan di Juba mengeluarkan anggaran penghematan pada Maret 2012 berdasarkan kerugian lengkap pendapatan minyak, mewakili 54 persen pemotongan pengeluaran dari yang sudah direncanakan. (burtong.net, 2012) Negara donor Sudan Selatan yang kecewa dengan dampak penghentian produksi minyak tersebut, merespon dengan memberikan bantuan signifikan dengan harapan mampu menebus hilangnya pendapatan minyak dan menghindari sengketa dengan Sudan. Sudan selatan menganggap donor tidak bisa mengerti bahwa minyak Sudan Selatan sedang sistematis dilucuti dan bahwa satu-satunya cara untuk melestarikan minyak tersebut adalah dengan meninggalkannya di sumur.

Ketegangan yang lebih tinggi terjadi ketika serangkaian gangguan-gangguan lintas-perbatasan dekat kota perbatasan Heglig sehingga Sekretaris Jenderal PBB menyatakan bahwa serangan Juba ke wilayah sengketa di sepanjang perbatasan itu 'merupakan pelanggaran dari kedaulatan Sudan dan tindakan yang jelas ilegal', sementara ia tidak merespon apa yang terjadi di Khartoum. (un.org, UN Secretary-General, Off-The-Cuff, press statement, 2012) Dampaknya, terjadi penurunan hubungan antara pemerintah Sudan Selatan dan donornya dengan cepat dan mutlak.

Menyadari bahwa ia tidak bisa menghabiskan uang yang tidak ia memiliki, Sudan Selatan melakukan penghematan dan mengatur tentang meminjam uang pada pasar komersial. Meskipun rincian dari pinjaman pasar komersial kepada pemerintah tidak jelas, laporan media menunjukkan bahwa mereka mungkin telah mencapai \$ 5 miliar. (VoiceofAmerica, 2013) Dalam prosesnya, pemerintah

kurang memperhatikan adanya indikasi bahwa individu senior dan lingkungan pemerintahan memperkaya diri melalui nepotisme dan korupsi. Presiden Kiir pada Mei 2015, menulis surat kepada 75 pejabat senior dan mantan pejabat, menuduh mereka telah menggelapkan uang \$ 4 miliar dan meminta pengembalian uang. (BBCNews, 2012) Namun, hal ini secara luas diyakini bahwa tidak ada tindakan nyata yang kemudian diambil terhadap dugaan penggelapan tersebut.

Setelah konsultasi dengan pemegang para pemangku kepentingan, termasuk kaukus legislatif SPLM, gubernur dan para pemimpin dari 17 partai politik lainnya, Presiden Kiir mengumumkan 20 nominasi untuk posisi sebagai menteri kabinet dan 12 sebagai wakil menteri, di antaranya 10 adalah perempuan. Hanya lima orang yang ditahan dari Kabinet sebelumnya. Pada tanggal 5 dan 6 Agustus, pilih komite yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Nasional ke dokter hewan kepercayaan dari calon dilakukan dengar pendapat individu untuk masing-masing calon, yang disiarkan langsung. Pada tanggal 7 Agustus, Majelis disetujui semua calon kecuali Menteri menunjuk Kehakiman, mempertanyakan kualifikasi hukumnya antara lain. Jabatan Menteri Kehakiman, dan Menteri di Kantor Presiden, tetap kosong.

Pada tanggal 23 Agustus, Presiden Kiir dinominasikan Ketua Dewan Perwakilan Nasional, yang juga Wakil Ketua Kedua SPLM, James Wani Igga, sebagai Wakil Presiden baru. Majelis Nasional menyetujui nominasi hari berikutnya. Pada tanggal 2 September, Majelis Nasional terpilih Manasse Magok Rundial sebagai Speaker baru dan Jasmine Samuel dan Mark Nyupuoch sebagai dua Wakil Ketua. Hal ini positif untuk dicatat bahwa Pemerintah baru lebih ramping dan mencakup perwakilan lebih dari partai politik lain dan beberapa

teknokrat. Selama pelantikan menteri baru, Presiden Kiir mengatakan bahwa mereka akan bertanggung jawab atas kinerja dan penggunaan sumber daya pemerintah mereka, melaporkan kemajuan rencana kerja mereka setiap tiga bulan. (Report of the Secretary-General on South Sudan S/2013/651, 2013)

Untuk sebagian besar penduduk, situasi di Sudan Selatan tidak banyak berubah, dan ada peningkatan kekhawatiran tentang arah politik dalam negeri. Banyak dari para menteri diberhentikan dan menyisakan loyalis. Pada pertengahan 2013 ada peningkatan perlawanan terhadap kepemimpinan presiden dari dalam jajaran SPLM. Pada saat yang sama, ada upaya untuk menjaga perbedaan pendapat ini dikurung, menimbulkan kecurigaan otokrasi yang lebih besar.

Selain adanya penolakan mantan wakil presiden Riek Machar, tampaknya ada oposisi lain yang tumbuh untuk Salva Kiir dari dalam partai yang berkuasa. Penolakan-penolakan tersebut diduga berasal dari individu-individu seperti Oyai Deng, mantan menteri keamanan nasional, Gier Chuang, mantan menteri dalam negeri, Majak d'Agoot, mantan wakil menteri pertahanan, dan Pagan Amum, mantan sekretaris jenderal SPLM, yang telah di reshuffle dari pemerintah pada awal tahun. Riek Machar sendiri membuat jelas bahwa meskipun ia memiliki pandangan yang berbeda dengan yang dimiliki oleh presiden, ia akan menggunakan cara-cara damai dalam struktur partai untuk memajukan penyebabnya. Sampai Desember 2013, masih belum jelas apakah semua tokoh yang telah di reorganisasi itu mendukung Machar atau tidak. Bahkan kemudian, mereka lebih mungkin telah dilemparkan bersama-sama yang akhirnya memunculkan agenda politik bersama. (Brown, 2014, hal. 6-7)

Sementara itu, ada yang meningkatkan kecurigaan bahwa presiden sudah mulai bertindak ekstra-konstitusional. Salva Kiir tampaknya telah melampaui kewenangannya setidaknya dua kali, termasuk melalui penghapusan dua gubernur negara terpilih dan penggantian mereka dengan gubernur pengganti yang lebih diterima rezim. (SudanTribune, Cracks in South Sudan presidency over dismissal of Unity state governor, 2013) Dia juga telah bertindak di luar ketentuan konstitusi partainya sendiri dengan melarutkan struktur pengambilan keputusan internal SPLM yang dicurigai sebagai oposisi. (SudanTribune, Kiir dissolves all South Sudan's SPLM structures, 2013)

Secara terpisah, dua potong signifikan undang-undang - satu membatasi hak-hak media, dan yang lainnya membatasi operasi organisasi non-pemerintah (LSM) - telah diusulkan oleh pemerintah. Termasuk untuk membangun otoritas pemerintah dalam mengawasi semua konten media. Yang terakhir diusulkan adalah untuk membatasi sektor non-pemerintah untuk layanan penyediaan, dan sangat membatasi kegiatan advokasi LSM. Proses peninjauan konstitusi berjalan tidak sesuai jadwal, dengan 55-anggota Komisi Peninjau Konstitusi National (yang telah ditunjuk oleh presiden dengan hampir tidak melakukan konsultasi) menjadi sangat dipolitisir.

Sementara itu, pasukan pemerintah dari SPLA telah berkembang secara diam-diam. Jumlah mereka sulit untuk diverifikasi, dipercaya jumlah mereka berada disekitar 3.000 orang pada paruh kedua tahun 2013 dan didominasi oleh kelompok etnis presiden yaitu Dinka. Kemampuan SPLA untuk menarik dana dan melaporkan langsung ke Salva Kiir mengindikasikan bahwa pasukan pemerintah



mulai terlihat lebih seperti tentara pribadi, tunduk hampir tidak ada kontrol atau pengawasan. (Brown, 2014, hal. 7-8)

### C. Dinamika Konflik di Sudan Selatan

Pada akhir November 2013, ketegangan antara Presiden, mantan Wakil Presiden, Riek Machar dan pemimpin SPLM senior lainnya meningkat. Dalam konferensi pers pada tanggal 6 Desember, Reek Machar secara terbuka menuduh presiden memiliki kecenderungan diktator dan unilateral dalam pengambilan keputusan, antara lain. Wakil Ketua SPLM dan saat ini Wakil Presiden Sudan Selatan, James Wani Igga, merespons pada tanggal 8 Desember, menggambarkan tuduhan itu sebagai tidak berdasar dan memperingatkan semua terhadap menghasutan pemberontakan.

Ketika pertemuan Dewan Pembebasan Nasional SPLM akhirnya digelar, setelah banyak penundaan, pada tanggal 14 Desember, perbedaan di antara para pemimpin partai mulai terlihat. Pertemuan itu dijadwalkan berlangsung selama tiga hari, untuk memungkinkan peserta untuk membahas dan mengesahkan dokumen dasar partai, termasuk manifesto dan konstitusi. Setelah seharian perdebatan sengit, Riek Machar dan beberapa anggota Dewan lainnya tidak muncul untuk sesi pada tanggal 15 Desember, di mana keputusan diresmikan. (Report of the Secretary-General on South Sudan S/2014/158, 2014)

Malam hari pada 15 Desember, kekerasan mulai terjadi. Berbagai elemen Pengawal Presiden mulai berkelahi di barak mereka di Juba, dekat tempat pertemuan Dewan Pembebasan Nasional. UNMISS tidak dapat memastikan apa sebenarnya yang memicu pertempuran. Namun, pada pagi hari tanggal 16

Desember, Presiden mengadakan konferensi pers di mana ia menggambarkan pertempuran yang terjadi semalam sebagai percobaan kudeta yang dilakukan oleh pasukan sekutu dengan Mantan Presiden Riek Machar. Machar, yang melarikan diri dari Juba ketika pertempuran meletus, menolak tuduhan upaya kudeta, menyatakan bahwa pertempuran telah dihasilkan dari perkelahian antara pasukan Pengawal Presiden di barak dan bahwa tuduhan kudeta adalah dalih untuk Pemerintah untuk menangkap lawan-lawan politiknya.

Pertempuran dengan cepat menyebar ke markas umum SPLA dan instalasi militer lainnya. Pada 16 Desember, pertempuran telah menyebar keluar dari barak ke daerah perumahan ibukota. Para pendukung masing-masing pihak berseteru terhadap satu sama lain dan mengakibatkan pembunuhan besar-besaran dan pelanggaran hak asasi manusia. Sementara ribuan warga sipil melarikan diri dan berpaling ke anggota pasukan keamanan nasional dan dievakuasi ke pangkalan UNMISS, pada 17 Desember, Pemerintah mengumumkan bahwa mereka telah menangkap 11 orang yang dituduh merencanakan kudeta bersama dengan Riek Machar. Kebanyakan orang telah berpartisipasi dengan dia dalam konferensi pers pada tanggal 6 Desember.

Pertempuran mengalami eskalasi dan berlanjut selama hari-hari berikutnya dan menyebar ke wilayah bagian Jonglei, Upper Nile dan Unity. Di dalam SPLA sendiri, muncul perpecahan dimana komandan membelot dan anggota jajaran mengambil posisinya masing-masing apakah setia kepada Presiden atau kawan-kawan SPLA mereka. Sejumlah besar warga sipil tewas oleh pasukan dari kedua belah pihak, sebagai pembelotan terus dan pertempuran menyebar.

Pada tanggal 19 Desember, Riek Machar mengumumkan kepada pers bahwa ia telah memohon kepada SPLM dan SPLA untuk menghapus Presiden dari kantor. Dua hari kemudian, pada tanggal 21 Desember, ia mengatakan kepada pers bahwa ia memberontak terhadap Pemerintah. Pada tanggal 3 Februari, ia mengumumkan kepada pers bahwa ia telah membentuk "perlawanan" kelompok untuk melawan Pemerintah. Pasukan oposisi bersenjata tersebut kemudian dikenal sebagai South Sudan People Liberation Movement/Army in Opposition (SPLM/A-IO). Di hari yang sama, delegasi dari Intergovernmental Authority on Development (IGAD), yang didukung oleh PBB dan Uni Afrika, melakukan perjalanan ke Juba dalam upaya untuk membendung krisis dan membujuk para pihak untuk menyelesaikan perbedaan mereka secara damai. Akhirnya pemerintah Sudan Selatan dan para anggota yang memproklamirkan diri sebagai SPLM/A-IO menyepakati untuk mencapai, secara inklusif, resolusi untuk krisis dan memulai dialog tanggal 31 Desember. (Security Council, Report of the Secretary-General on South Sudan S/2014/158, 2014, hal. 2)

IGAD, yang melakukan konsultasi individu, pembicaraan proxy dan pembicaraan langsung, dimulai proses negosiasi formal antara pihak-pihak di Addis Ababa pada tanggal 4 Januari. Setelah sekitar 20 hari pembicaraan, pada tanggal 23 Januari Pemerintah dan SPLM/A-IO menandatangani kesepakatan Cessation of Hostilities (CoH). Tahap kedua dari dialog politik dan proses rekonsiliasi nasional dilanjutkan di Addis Ababa pada 3 Maret 2016. Selama putaran itu, kedua pihak mencapai kesepakatan pada *Monitoring and Verification Mechanism (MVM)/Ceasefire and Transitional Security Arrangements Monitoring Mechanism (CTSAMM)* dan dibahas jalan ke depan pada dialog

nasional dan isu-isu yang berkaitan dengan SPLM. Para pihak diharapkan untuk mengadakan pembicaraan lanjutan pada Maret. Sementara itu, pertempuran di berbagai lokasi terus terjadi dan kedua belah pihak tetap melanggar CoH.

Krisis politik dan perpecahan aparat keamanan telah mempengaruhi 10 negara bagian Sudan Selatan dengan cara yang berbeda. Konsekuensi terhadap penduduk sipil juga telah bervariasi dari negara ke negara. Empat dari 10 negara Sudan Selatan, yaitu Jonglei, Unity, Upper Nile dan Equatoria Tengah, telah melihat yang terburuk dari pertempuran sejak terjadinya krisis saat ini pada tanggal 15 Desember 2013. Wilayah Lakes dan Warab telah menerima ribuan pengungsi dari Jonglei dan Unity, masing-masing, sebagai konsekuensi dari pertempuran. Efek pada empat negara yang tersisa (Eastern dan Western Equatoria dan Northern dan Western Bahr el Ghazal), di mana tidak ada pertempuran, sejauh ini telah terbatas pada perpindahan skala kecil dari negara-negara lain, beberapa pembelotan dan perekrutan oleh Pemerintah untuk mengisi jajaran SPLA habis oleh pembelotan. (SecretaryGeneral/2014/158 hal 3)

Di Central Equatoria, Ibukota Juba telah menjadi wilayah yang paling terkena dampak. Sejumlah besar warga sipil dilaporkan telah ditargetkan dan dibunuh di Juba, terutama selama tiga hari pertama pertempuran, dan ada laporan dari kelanjutan dari pelanggaran hak asasi manusia sporadis. Pertempuran juga terjadi di kabupaten Yei, Mangalla dan Terakeka, serta di Rokon, di perbatasan dengan Western Equatoria State, dan di Rajaf, ke selatan, di mana bentrokan pecah di barak yang akhirnya ditinggalkan tentara. Di lingkungan dari Juba, terjadi pertempuran dimana SPLA mendorong pasukan anti-pemerintah ke pinggiran kota. Selama lebih dari dua minggu, dari 18 Desember-4 Januari 2014,

terjadi pertempuran intensif pada sumbu Juba-Bor, khususnya di sekitar Gemmazia. Pasukan anti-pemerintah berusaha untuk maju menuju Juba dari Bor. Kantong pasukan anti-pemerintah terus tersebar di sekitar Juba, di mana mantan pemimpin milisi Gabriel Tanginye dilaporkan akan mengerahkan kekuatan melawan pemerintah. Di laporkan juga bahwa mantan Menteri Lingkungan Hidup Alfred Ladu Gore, yang meninggalkan Juba setelah krisis meletus, mempertahankan kehadiran pemberontak di sekitar Juba dengan sekelompok pasukan anti-pemerintah.

Pada tanggal 10 Januari 2014, Gubernur Center, Eastern dan Western Equatoria mengadakan sebuah konferensi "darurat Equatoria", di mana mereka menyatakan dukungan mereka kepada Pemerintah dan sepakat untuk memobilisasi 5.000 calon masing-masing untuk mempertahankan wilayah equatorian dan orang-orang. Di Central Equatoria, Gubernur mampu memobilisasi beberapa ribu pemuda dalam mendukung Pemerintah.

Ibukota wilayah Jonglei, Bor, jatuh di bawah kendali pasukan anti-pemerintah pada 18 Desember 2013 setelah Mayor Jenderal Peter gadet, kantor pusat Panglima Divisi SPLA 8 di Panpandiar, membelot bersama dengan sebagian besar tentaranya. Sejumlah besar warga sipil dilaporkan ditargetkan dan dibunuh selama dan setelah pembelotan itu.

Sebuah serangan mematikan yang tampaknya termotivasi perbedaan etnis pada 19 Desember 2013 oleh kelompok bersenjata di *camp* UNMISS di Akobo, Jonglei, di mana warga sipil mengungsi, mengakibatkan kematian dua penjaga perdamaian UNMISS, salah satu konsultan internasional dan setidaknya 19 warga

sipil. Hari berikutnya, di Yuai, dua helikopter UNMISS yang sedang mengevakuasi personil militer dan pengungsi internal di serang senjata api kecil oleh pasukan anti-pemerintah. Di Bor, pada tanggal 24 Desember, terjadi beberapa serangan terhadap UNMISS, mengakibatkan luka tiga pasukan penjaga perdamaian. Risiko yang dihadapi selama periode ini memburuk sehingga Misi diminta untuk merelokasi personil dari Yuai dan Gumuruk.

Sementara itu, pasukan SPLA merebut kembali Bor pada 25 Desember. Kota tersebut kemudian jatuh di bawah kendali pasukan anti-pemerintah, untuk kedua kalinya, pada tanggal 31 Desember 2013. Pasukan SPLM/A-IO dan kolom dari beberapa ribu pemuda Nuer bersenjata bergerak menuju Bor dari daerah Akobo dan mulai maju ke selatan di sepanjang jalan utama dari Bor ke Juba. pertempuran sengit antara SPLA dan pasukan anti-pemerintah terjadi di hari-hari berikutnya. SPLA mendapatkan bala bantuan dari daerah Bahr el Ghazal dan Pasukan Pertahanan Rakyat Uganda di garis depan, SPLA mampu mendorong pasukan anti-pemerintah ke utara dan akhirnya merebut kembali Bor pada tanggal 18 Januari 2014. Pasukan anti-pemerintah terus mempertahankan kabupaten Akobo, Nyirol dan Uror. (SecurityCouncil, Report of the Secretary-General on South Sudan S/2014/158, 2014, hal. 3-4)

SPLA, didukung oleh tentara Uganda, tetap mengendalikan ibukota wilayah, Bor. daerah lain tetap tegang, dengan laporan yang belum dikonfirmasi dari bentrokan antara SPLA dan SPLM/A-IO di kabupaten Twic Timur, Ayod dan Duk awal Mei mengakibatkan perpindahan sipil dari kabupaten Awerial di Lakes. Dalam Duk dan Ayod, antara 1.000 dan 1.500 tentara SPLA dilaporkan meninggalkan pos-pos mereka karena gaji mereka belum dibayar. Sementara itu,

sekitar 1.000 pergi ke Bahr el Ghazal, kabarnya untuk mencari pembayaran. (SecretaryGeneral/2014/537 hal 5).

Pada tanggal 21 Desember, komandan SPLA Divisi 4 di Bentiu membelot, bersama dengan sebagian besar pasukannya, menggulingkan Gubernur Unity dan mengangkat dirinya sendiri sebagai juru kunci Gubernur baru. Setelah memimpin, sebagian besar dari SPLA Divisi 4 membelot. Pada hari yang sama, Bentiu jatuh di bawah kendali pasukan anti-pemerintah. SPLA merebut kembali Bentiu pada tanggal 10 Januari 2014, menyusul pertempuran sengit di wilayah utara Unity. SPLA terus melakukan serangan ofensif untuk merebut kembali wilayah dan kota-kota lainnya di bawah kendali pasukan anti-pemerintah. Pasukan anti-pemerintah muncul untuk mempertahankan kehadirannya di kabupaten Panyijar dan Mayendit. Daerah lain, termasuk ladang minyak, tetap diperebutkan, dan aliran minyak dari ladang minyak di Unity telah berhenti. Pada awal Februari, meskipun menandatangani penghentian perjanjian permusuhan (Cessation of Hostilities/CoH), pasukan SPLA tetap menyerang dan memenangkan Leer, kota asal Mr. Machar.

Malakal, ibukota wilayah Upper Nile, jatuh di bawah kendali pasukan anti-pemerintah pada 25 Desember 2013. Hal itu direbut kembali oleh SPLA pada tanggal 27 Desember, jatuh kembali di bawah kendali anti-pemerintah pada 14 Januari dan direbut kembali lagi dengan SPLA pada 20 Januari. Sementara SPLA mengkonsolidasikan posisinya di Malakal, pasukan anti-pemerintah terus dipertahankan pada sejumlah daerah lain di luar Malakal, termasuk di kabupaten Nassir dan Ulang; yang mana daerah lain juga tetap diperebutkan. Pada tanggal 18 Februari, SPLM/A-IO sekali lagi menyerang dan mengambil alih Malakal, dan

merupakan pelanggaran serius lain dari CoH. (Security Council, Report of the Secretary-General on South Sudan S/2014/158, 2014, hal. 5)

Ketegangan juga mulai meningkat di wilayah Bahr el Ghazal. Di Western Bahr el Ghazal, pertempuran pecah antara Dinka orang-orang muda dan tentara Nuer pada 25 April di barak Mapel SPLA, sehingga tidak diketahui jumlah kematian dan perpindahan antara 100 dan 200 warga Nuer (termasuk tentara Nuer dan keluarga mereka) terutama untuk ibukota wilayah, Wau. Antara 26 dan 28 April, menyusul pembelotan oleh tentara Nuer, ada bentrokan tambahan antara faksi-faksi SPLA saingan di Wau. Ketidakamanan terus meningkat, dengan pembelot beralih ke bandit di sepanjang jalan-jalan utama di negara bagian. Di Northern Bahr el Gazal, beberapa pembelotan juga dilaporkan.

Situasi di ibukota, Juba, tetap tegang. Insiden beberapa penembakan di dalam dan di dekat barak SPLA yang melibatkan tentara SPLA pada tanggal 5 Maret 2014, dilaporkan berkaitan dengan sengketa pembayaran gaji, menyebabkan korban sipil. Ketegangan meningkat antara anggota Dinka dan masyarakat equatorian yang selama debat federalisme dan dilaporkan memicu tembakan di bagian Juba pada malam 28 dan 29 Juni. Pada 2 Juli, ratusan tentara SPLA dikerahkan ke Terekeka, utara dari Juba, dan dilaporkan ada kaitannya dengan mobilisasi pasukan Mundari dari etnis lokal oleh Gubernur, namun ia menyangkal rumor tersebut.

Awal Mei, Pagan Amum, Oyai Deng Ajak, Yehezkiel Lol Gatkuoth dan Majak D'Agoot dibebaskan dari tahanan menyusul perintah dari Menteri Kehakiman pada tanggal 25 April menyelesaikan proses pidana terhadap 11 tokoh



politik yang ditangkap pada akhir Desember 2013 karena pengkhianatan. Mereka berempat kemudian berpartisipasi dalam negosiasi meja bundar di Addis Ababa. Meninggalkan proses pidana khusus yang dikecualikan untuk tiga tokoh politik tambahan dituduh tuduhan yang sama: Riek Machar, Alfred Lado Gore dan Taban Deng Gai.

Pada bulan Mei 2014 hingga Juni, tingkat kekerasan yang terjadi terus mengalami penurunan drastis. Hal ini ditengarai sebagai implikasi dari keterlibatan IGAD yang secara berkesinambungan mengadakan dialog-dialog untuk menyelesaikan konflik. Pertempuran skala kecil terus berlangsung di sekitar Nasser dan Abu Khadra dekat Renk, dengan kontrol SPLA mempertahankan kedua lokasi. Rumah sakit di Nasser dan situs di dekatnya telah banyak dijajah.

Pada tanggal 10 Juni, IGAD Kepala Negara mengadakan pertemuan puncak untuk membahas situasi di Sudan Selatan, antara lain. Presiden dan Riek Machar bertemu di pinggiran puncak dan setuju untuk mempercepat dan dialog lengkap tentang pembentukan pemerintah transisi persatuan nasional dalam waktu 60 hari. Namun demikian, SPLM / A di Oposisi menolak untuk menghadiri perundingan meja bundar multi-stakeholder ketika mereka berkumpul kembali pada tanggal 20 Juni. Ini dikutip keberatan dengan kehadiran pemangku kepentingan selain yang dari Pemerintah dalam negosiasi politik langsung dan mengangkat isu-isu selama pemilihan perwakilan organisasi masyarakat sipil, partai politik dan lembaga iman. Negosiasi tersebut kemudian ditunda tanpa batas waktu dan tim mediasi kini konsultasi para pihak dalam perjalanan ke depan.

Pada akhir Juni, UNMISS menerima laporan bahwa SPLM/A-IO memobilisasi dan melatih orang-orang muda di Nasser dan Maiwut kabupaten, tampaknya dalam persiapan untuk operasi militer untuk merebut kembali kota Nasser. Beberapa 60 sampai 80 tentara SPLA bersenjata dilaporkan meninggalkan pos-pos mereka di Nasser pada bulan Juni, diduga sebagai akibat dari keterlambatan pembayaran gaji mereka.

Pada tanggal 20 Juli 2014, SPLM/A-IO, terdiri dari orang-orang muda 'White Army' Nuer, melancarkan serangan di kota Nasser. Sejak itu, pertempuran sengit terus terjadi, khususnya atas kontrol dari basis SPLA utama di kota. Pada 21 Juli 37 tentara SPLA, enam di antaranya terluka, berlindung di *camp* UNMISS di Nasser setelah meninggalkan senjata dan seragam mereka. Serangan itu adalah pelanggaran besar pertama dari penghentian perjanjian permusuhan sejak perjanjian 10 Juni.

Sejumlah 3,7 juta orang tetap di krisis dan darurat tingkat kerawanan pangan. Jumlah ini diproyeksikan meningkat menjadi 4 juta pada akhir Juli. Lebih dari 1,5 juta orang terpaksa mengungsi dari rumah mereka. Dari orang-orang, lebih dari 1,1 juta pengungsi dalam Sudan Selatan tersebar di 186 lokasi. Diperkirakan 400.000 orang telah melarikan diri melintasi perbatasan ke negara-negara tetangga, sementara 500.000 orang konflik-pengungsi telah menetap di daerah rawan banjir dan beresiko beberapa perpindahan. Pada saat penyusunan laporan ini, beberapa 97.000 pengungsi yang mencari perlindungan di situs UNMISS.

Tidak hanya itu, dampak dari konflik lebih luas menyangkut perpindahan penduduk yang signifikan yang disebabkan oleh pertempuran di Jonglei, Unity dan Upper Nile terus membahayakan musim tanam utama, yang berlangsung dari April sampai Juni, lebih memperburuk situasi kemanusiaan. Di wilayah Greater Upper Nile, lebih dari 50 persen dari populasi sudah pada krisis atau darurat tingkat kerawanan pangan. malnutrisi akut pada anak-anak di bawah usia 5 tahun telah dua kali lipat sejak Januari. Diperkirakan 223.000 anak-anak akan menderita gizi buruk akut parah dan sampai 50.000 mungkin mati jika layanan deteksi dan pengobatan tidak segera ditingkatkan. Jutaan South Sudan juga berisiko penyakit menular, termasuk diare berair, hepatitis E, dan malaria, karena sanitasi dan kebersihan kondisi miskin dan perusakan klinik dan prasarana kesehatan vital lainnya. Pada 15 Juli tercatat ada 4278 kasus kolera. (SecurityCouncil, Report of the Secretary-General on South Sudan S/2014/537, 2014, hal. 5-6)